

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Bank Dunia 2021 mengungkapkan bahwa negara-negara dengan skor tata kelola keuangan publik yang tinggi memiliki kinerja pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lebih baik. Skor tata kelola keuangan publik ini mencakup berbagai aspek, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Penemuan ini menekankan bahwa kompetensi, motivasi, dan komitmen organisasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan tata kelola keuangan publik dan, pada akhirnya, kinerja pengelola keuangan SKPD. Kompetensi mengacu pada kemampuan teknis dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola keuangan secara efektif. Motivasi berhubungan dengan dorongan internal para pegawai untuk mencapai tujuan organisasi, sementara komitmen organisasi mencerminkan dedikasi para pegawai terhadap visi dan misi organisasi. Kombinasi dari ketiga faktor ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk implementasi kebijakan keuangan yang baik dan meningkatkan kinerja pengelola keuangan SKPD secara keseluruhan (World Bank, 2021).

Studi OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) yang merupakan forum dan pusat pengetahuan untuk data, analisis, dan praktik terbaik dalam kebijakan publik, bekerja dengan lebih dari 100 negara di seluruh dunia untuk membangun masyarakat yang

lebih kuat, lebih adil, dan lebih bersih serta membantu membentuk kebijakan yang lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik pada tahun 2022 menunjukkan bahwa negara-negara yang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) secara efektif mengalami peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelola keuangan SKPD. SIMDA adalah sebuah sistem yang dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola anggaran, pelaporan keuangan, dan pemantauan kinerja secara lebih efisien dan transparan. Penerapan SIMDA yang efektif tidak hanya memfasilitasi proses pelaporan yang lebih cepat dan akurat, tetapi juga meningkatkan kemampuan pengawasan dan audit internal. Hal ini memungkinkan identifikasi dan mitigasi potensi penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran secara lebih dini. Penemuan ini mengindikasikan bahwa SIMDA dapat membantu meningkatkan kompetensi dengan menyediakan alat dan pelatihan yang diperlukan untuk pengelola keuangan yang lebih baik. Selain itu, sistem ini dapat meningkatkan motivasi dengan memberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerja yang baik, serta meningkatkan komitmen organisasi dengan memperkuat budaya transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan publik (OECD, 2022).

Pada level Asia Tenggara, Filipina telah melakukan reformasi keuangan publik yang komprehensif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Reformasi ini telah menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam

transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan penerapan SIMDA, proses pelaporan keuangan menjadi lebih efisien dan akurat, memungkinkan pemerintah untuk memantau dan mengaudit penggunaan anggaran secara lebih efektif. Hal ini juga mempermudah identifikasi penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran, sehingga tindakan korektif dapat dilakukan dengan cepat. Reformasi ini menunjukkan bahwa dengan sistem yang tepat dan komitmen yang kuat, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelola keuangan publik dapat ditingkatkan secara signifikan (ADB, 2022).

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan tata kelola sektor publik, termasuk penerapan SIMDA. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, motivasi, dan komitmen organisasi dalam mengelola keuangan publik. Kompetensi ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para pegawai, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola keuangan daerah dengan efektif. Motivasi dan komitmen diperkuat dengan menerapkan sistem insentif dan penghargaan, serta membangun budaya organisasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, diharapkan pengelola keuangan publik di Indonesia menjadi lebih baik dan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional (World Bank, 2021).

Kompetensi adalah faktor krusial dalam konteks pengelola keuangan SKPD melalui sistem informasi pemerintahan daerah. Tingkat kompetensi yang tinggi di antara pegawai SKPD memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang regulasi keuangan, keterampilan akuntansi, dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem informasi dengan efektif. Pegawai yang terampil dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, yang merupakan fondasi penting bagi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelola keuangan publik.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar, Y. L. (2020), Sari et al. (2023), Wibowo et.al (2023), Aziz et.al (2023) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari et al. (2021) yang menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kinerja. Serta penelitian yang dilakukan oleh Tupti & Siswadi (2022) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja.

Motivasi juga memainkan peran signifikan dalam meningkatkan kinerja pengelola keuangan di SKPD. Motivasi yang tinggi mendorong pegawai untuk bekerja dengan lebih giat dan teliti dalam melaksanakan tugas-tugas keuangan mereka. Dorongan untuk mencapai tujuan organisasi dan merasakan kepuasan dari pencapaian hasil yang baik dapat memotivasi mereka untuk mengadopsi sistem informasi baru

dengan lebih cepat dan efektif. Ini penting karena implementasi sistem informasi yang sukses sering kali tergantung pada tingkat penerimaan dan penggunaan yang baik dari pegawai.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Elisnawati et al. (2023), Kaunang (2020), Budung et.al (2022), Rahim et.al (2020) yang menyatakan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Al-Giffari et al. (2023) dan Wibowo et.al (2023) yang menyatakan bahwa variabel motivasi kerja secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai.

Komitmen organisasi menunjukkan seberapa besar pegawai SKPD merasa terikat dan loyal terhadap organisasi mereka. Komitmen yang tinggi biasanya berkorelasi dengan tingkat partisipasi yang lebih tinggi dalam inisiatif-inisiatif organisasi, termasuk adopsi teknologi baru seperti sistem informasi pemerintahan daerah. Pegawai yang komited cenderung lebih siap untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul selama implementasi sistem baru dan bersedia berinvestasi dalam upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pengelola keuangan.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2020), Wibowo et.al (2023), Al-Badawi & Assi (2022), Hairuddin (2017) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Hendri & Kirana (2021) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada kinerja.

Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah sendiri membawa dampak yang signifikan terhadap pengelola keuangan SKPD. Sistem informasi yang efektif tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomatisasi proses-proses administratif, tetapi juga meningkatkan akurasi dan kualitas data keuangan yang dihasilkan. Dengan memfasilitasi akses yang lebih mudah dan cepat terhadap informasi, sistem ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat, yang merupakan langkah penting menuju transparansi yang lebih besar dalam pengelola keuangan publik.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tumija (2023), Dewi (2023), dan Ariyani & Maghfiroh (2022) yang menyatakan bahwa Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja.

Tabel 1 Research Gap Penelitian terdahulu

Variabel	Penelitian yang Menunjukkan Pengaruh Signifikan	Penelitian yang Menunjukkan Pengaruh Negatif atau Tidak Signifikan
Kompetensi	Siregar, Y. L. (2020)	Ratnasari et al. (2021)
	Sari et al. (2023)	Tupti & Siswadi (2022)
	Wibowo et al. (2023)	
	Aziz et al. (2023)	
Motivasi	Elisnawati et al. (2023)	Al-Giffari et al. (2023)
	Kaunang (2020)	Wibowo et al. (2023)
	Budung et al. (2022)	
	Rahim et al. (2020)	
Komitmen Organisasi	Siregar (2020)	Hendri & Kirana (2021)

Variabel	Penelitian yang Menunjukkan Pengaruh Signifikan	Penelitian yang Menunjukkan Pengaruh Negatif atau Tidak Signifikan
	Wibowo et al. (2023)	
	Al-Badawi & Assi (2022)	
	Hairuddin (2017)	
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	Tumija (2023)	-
	Dewi (2023)	
	Ariyani & Maghfiroh (2022)	

Sumber: Data Primer, 2024

Pengelola keuangan merupakan salah satu aspek krusial dalam administrasi pemerintahan daerah, terutama dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran. Studi awal yang dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Maybrat, Papua Barat, masalah yang dihadapi dalam pengelola keuangan menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik dari segi kompetensi, motivasi, maupun implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Pertama terkait Kompetensi pengelola keuangan di Kabupaten Maybrat menjadi salah satu isu utama yang mempengaruhi efektivitas pengelola keuangan daerah. Berdasarkan observasi, banyak bendahara pengeluaran yang memiliki kompetensi rendah dalam mengelola keuangan, sehingga tidak mampu menjalankan sistem pengelola keuangan dengan baik. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa banyak pegawai non-PNS yang bekerja sebagai operator dalam pengelola keuangan, menggantikan peran bendahara yang seharusnya.

Kesenjangan ini menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pembinaan yang sistematis agar standar operasional dapat terpenuhi.

Kedua mengenai Implementasi SIPD di Kabupaten Maybrat juga menghadapi berbagai tantangan. SIPD yang merupakan evolusi dari sistem sebelumnya (SIPKD dan SIMDA) memerlukan adaptasi yang cepat dari para pegawai. Namun, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai masih menjadi kendala utama. Kurangnya sosialisasi dan pendampingan dalam penggunaan SIPD menyebabkan banyak pengelola keuangan mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem ini. Permasalahan ini tidak hanya terjadi di Maybrat, tetapi juga di daerah-daerah lain di Wilayah Papua, termasuk beberapa daerah di Indonesia. Keterbatasan koordinasi yang kini berpusat pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), berbeda dengan saat SIMDA masih dikelola oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memiliki tenaga di seluruh kabupaten dan kota.

Ketiga terkait Motivasi pegawai dalam mengelola keuangan di Kabupaten Maybrat juga terbilang rendah. Kurangnya motivasi ini terlihat dari minimnya dorongan atau insentif dari pimpinan BPKD sebagai kuasa bendahara umum daerah. Bendahara pengeluaran sering kali tidak diberi kesempatan untuk meningkatkan motivasi kerja mereka, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan keuangan. Hal ini menyebabkan bendahara cenderung pasif dan tidak proaktif dalam

menyelesaikan tugas-tugasnya. Kesenjangan antara harapan terhadap kinerja optimal dan kenyataan motivasi yang rendah ini membutuhkan perhatian serius untuk diatasi melalui program peningkatan motivasi dan insentif yang tepat.

Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa kompetensi individu berhubungan erat dengan kinerja kerja. Namun, ada kekurangan dalam penelitian yang mengkaji interaksi antara kompetensi dan faktor lain seperti ketidakamanan kerja dan komitmen organisasi. Ketidakamanan kerja dapat mempengaruhi bagaimana individu memanfaatkan kompetensi mereka, sementara komitmen organisasi dapat mempengaruhi sejauh mana individu menerapkan kompetensi mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana ketiga faktor ini berinteraksi dan mempengaruhi kinerja kerja secara keseluruhan.

Penelitian sebelumnya sering memandang motivasi sebagai faktor tunggal yang mempengaruhi kinerja. Namun, motivasi sering kali berinteraksi dengan faktor lain seperti disiplin kerja dan kompensasi. Disiplin kerja dapat memoderasi efek motivasi terhadap kinerja, sementara kompensasi dapat berfungsi sebagai insentif yang memperkuat motivasi. Kombinasi dari ketiga faktor ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana kinerja kerja dapat ditingkatkan. Penelitian lebih lanjut perlu mengeksplorasi dinamika ini untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam.

Budaya organisasi dan komitmen pegawai sering dianggap sebagai faktor yang berdiri sendiri dalam penelitian kinerja organisasi. Namun, komitmen pegawai dapat berfungsi sebagai mediator yang penting antara budaya organisasi dan kinerja organisasi. Budaya organisasi yang kuat dapat meningkatkan komitmen pegawai, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja organisasi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi peran mediasi ini dan memahami bagaimana budaya organisasi dapat dioptimalkan untuk meningkatkan komitmen dan kinerja pegawai.

Penelitian tentang pengelola keuangan dan implementasi SIPD sudah banyak dilakukan di berbagai daerah. Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji permasalahan kompetensi, motivasi, dan implementasi SIPD di Kabupaten Maybrat masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi yang signifikan sebagai penelitian lanjutan yang mendalami isu-isu yang spesifik dan unik di Kabupaten Maybrat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan literatur terkait pengelola keuangan daerah dan implementasi SIPD, serta memberikan solusi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelola keuangan mereka.

Dengan uraian latar belakang yang jelas ini, peneliti dapat lebih mudah merumuskan masalah atau pertanyaan penelitian yang tepat, sehingga penelitian yang dilakukan dapat memberikan jawaban dan solusi yang relevan terhadap permasalahan yang dihadapi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Maybrat?
- 2) Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Maybrat?
- 3) Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Maybrat?
- 4) Apakah kompetensi berpengaruh terhadap implementasi sistem informasi Pemerintah daerah pada Kabupaten Maybrat?
- 5) Apakah motivasi berpengaruh terhadap terhadap implementasi sistem informasi Pemerintah daerah pada Kabupaten Maybrat?
- 6) Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap terhadap implementasi sistem informasi Pemerintah daerah pada Kabupaten Maybrat?
- 7) Apakah implementasi sistem informasi Pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Maybrat?
- 8) Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah

Kabupaten Maybrat melalui implementasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD)?

- 9) Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Maybrat melalui implementasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD)?
- 10) Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Maybrat melalui implementasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuannya Penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Maybrat?
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Maybrat?
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Maybrat?

- 4) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap implementasi sistem informasi Pemerintah daerah pada Kabupaten Maybrat?
- 5) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi terhadap implementasi sistem informasi Pemerintah daerah pada Kabupaten Maybrat?
- 6) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap implementasi sistem informasi Pemerintah daerah pada Kabupaten Maybrat?
- 7) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh implementasi sistem informasi Pemerintah daerah terhadap kinerja pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Maybrat?
- 8) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Maybrat melalui implementasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD)?
- 9) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Maybrat melalui implementasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD)?
- 10) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah

(SKPD) Pemerintah Kabupaten Maybrat melalui implementasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD)?

D. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat praktis dan manfaat teoritis dari penelitian terkait manfaat praktis dan manfaat teoritis.

Manfaat Praktis:

1. Peningkatan Kinerja Pengelola Keuangan dalam Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan kinerja pengelola keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Maybrat. Hasil penelitian dapat dijadikan acuan bagi para pengelola keuangan untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi, motivasi, serta komitmen mereka dalam bekerja.
2. Optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah artinya dengan mengetahui pengaruh implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap kinerja pengelola keuangan, penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan SIPD untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelola keuangan.
3. Peningkatan Pelayanan Publik dalam hal Implementasi SIPD yang efektif akan mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelola keuangan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan memperbaiki kualitas pelayanan publik.

4. Penelitian ini dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam hal kompetensi, motivasi, dan komitmen organisasi. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar untuk program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah.

Manfaat Teoritis:

1. Pengembangan Teori Manajemen Sumber daya manusia khususnya fokus pada Keuangan Publik, Penelitian ini dapat memperkaya literatur dan teori terkait manajemen Manajemen Sumber daya manusia, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah. Hasil penelitian dapat menambah pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelola keuangan di SKPD.
2. Kontribusi pada Teori Motivasi dan Komitmen Organisasi, Temuan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai hubungan antara motivasi, komitmen organisasi, dan kinerja pengelola keuangan. Hal ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori motivasi dan komitmen organisasi dalam konteks sektor publik.
3. Inovasi dalam Implementasi SIPD, Penelitian ini dapat mengidentifikasi best practices dan tantangan dalam implementasi SIPD di pemerintahan daerah. Hal ini dapat menjadi referensi bagi

pengembangan teori terkait inovasi teknologi informasi dalam pengelola keuangan publik.

4. Studi Kasus untuk Penelitian Lanjutan, Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai studi kasus yang relevan untuk penelitian lanjutan di bidang manajemen keuangan publik dan implementasi sistem informasi dalam sektor pemerintahan.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan baik secara praktis maupun teoritis dalam bidang pengelola keuangan publik dan implementasi teknologi informasi di pemerintahan daerah.

E. Orisinalitas Penelitian

Berikut adalah pernyataan tentang orisinalitas penelitian

- 1) Studi Kontekstual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat, Penelitian ini merupakan salah satu studi pertama yang secara khusus meneliti pengaruh kompetensi, motivasi, dan komitmen organisasi terhadap kinerja pengelola keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Maybrat. Dengan fokus pada konteks lokal ini, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur manajemen keuangan publik.
- 2) Integrasi Faktor Kompetensi, Motivasi, dan Komitmen Organisasi, Penelitian ini unik dalam pendekatannya yang mengintegrasikan tiga faktor utama—kompetensi, motivasi, dan komitmen organisasi—sebagai variabel yang mempengaruhi kinerja pengelola keuangan.

Meskipun ada banyak studi yang meneliti faktor-faktor ini secara terpisah, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi sinergi antara ketiganya dan dampaknya terhadap kinerja.

- 3) Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Penelitian ini mengeksplorasi dampak implementasi SIPD terhadap pengelola keuangan di SKPD, yang merupakan area studi yang relatif baru. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pengelola keuangan di pemerintahan daerah.
- 4) Fokus pada Efektivitas dan Efisiensi Pengelola Keuangan, Penelitian ini tidak hanya berfokus pada kinerja pengelola keuangan secara umum tetapi juga pada efektivitas dan efisiensi yang diperoleh melalui implementasi SIPD. Penekanan ini memberikan dimensi orisinal dalam memahami bagaimana sistem informasi dapat mengubah proses dan hasil pengelola keuangan di tingkat pemerintah daerah.
- 5) Relevansi dengan Kebijakan Pemerintah, Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan kebijakan pemerintah dengan memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk meningkatkan kinerja pengelola keuangan di SKPD. Hal ini sangat relevan dalam konteks desentralisasi dan upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.